

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693057/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (693057) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 217.600.000 (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
- 135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 217.600.000
Rp. 217.600.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 217.600.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 217.600.000

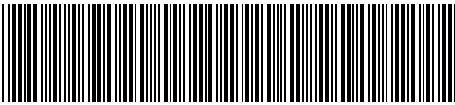
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3172-5472-8507-0972

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693057) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

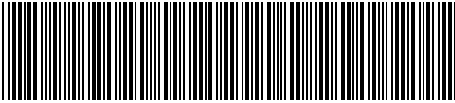
Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				217.600.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				217.600.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		150,00	Rekomendasi Kebijakan	167.306.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah		150.00	Rekomendasi Kebijakan	167.306.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	31.054.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah		1.00	Lembaga	31.054.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	19.240.000
Rincian Output	:	01	FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	19.240.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
I B. SUMBER DANA



DS:3172-5472-8507-0972

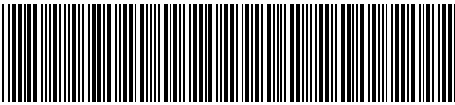
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693057) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	217.600.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	217.600.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3172-5472-8507-0972

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693057) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

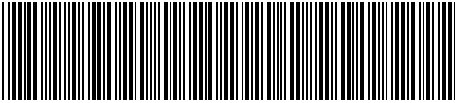
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693057	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	-	217.600	-	-	-	217.600	34 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	217.600	-	-	-	217.600		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	217.600	-	-	-	217.600		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	167.306	-	-	-	167.306		
01	RM	-	167.306	-	-	-	167.306		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	31.054	-	-	-	31.054		
01	RM	-	31.054	-	-	-	31.054		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	19.240	-	-	-	19.240	34 . 51	
01	RM	-	19.240	-	-	-	19.240	178	
JUMLAH		-	217.600	-	-	-	217.600		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3172-5472-8507-0972

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693057) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

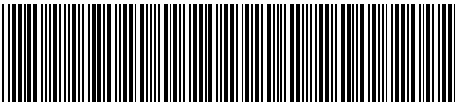
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693057	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	14.299	36.129	32.344	64.234	24.505	9.078	13.922	17.394	5.698	0	217.600
		BELANJA BARANG	0	0	14.299	36.129	32.344	64.234	24.505	9.078	13.922	17.394	5.698	0	217.600
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	0	14.299	36.129	32.344	64.234	24.505	9.078	13.922	17.394	5.698	0	217.600
	135.03.BB.7129	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	14.299	36.129	32.344	64.234	24.505	9.078	13.922	17.394	5.698	0	217.600

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
IV A. B L O K I R



DS:3172-5472-8507-0972

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693057] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

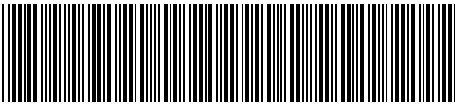
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693057/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3172-5472-8507-0972

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693057] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001